

**Wacana Konflik Internal Keraton Yogyakarta
(Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Kedaulan Rakyat (KR) Dan
Tribun Jogja Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-
XIV/2016 Bulan September 2017)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh

Nama : Wulan Ruditasari

NIM : 20120530110

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

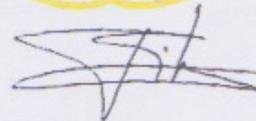
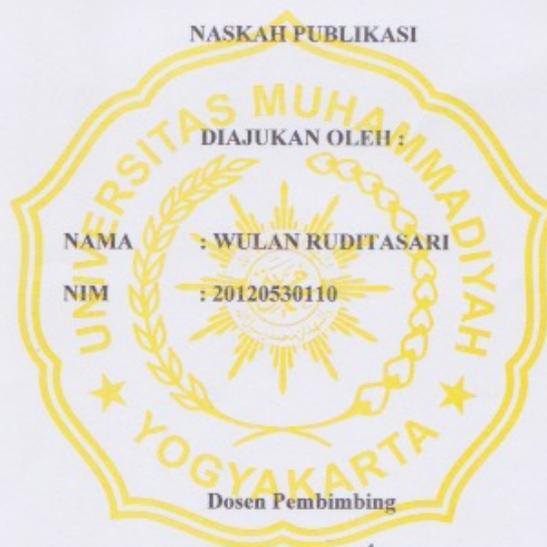
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Jurusan Ilmu Komunikasi

HALAMAN PERSETUJUAN

**Wacana Konflik Internal Keraton Yogyakarta
(Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Kedaulan Rakyat (KR) Dan
Tribun Jogja Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-
XIV/2016 Bulan September 2017)**

NASKAH PUBLIKASI



Dr. Filosa Gita Sukmono., S.IKom., MA

Wacana Konflik Internal Keraton Yogyakarta
(Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Dan
Tribun Jogja Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-
XIV/2016 Bulan September 2017)

Wulan Ruditasari

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPOL UMY

Email: wulan.rudita@gmail.com

Yogyakarta merupakan daerah istimewa dengan keunikan dalam hal kepemimpinan. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Yogyakarta tidak menggunakan sistem pemilihan umum untuk menentukan calon gubernur. Calon gubernur DIY ditentukan dengan cara penetapan secara tradisional mengikuti hukum tradisional Kraton Yogyakarta. Kepemimpinan ditentukan berdasarkan garis keturunan laki-laki dalam kerajaan. Masalah timbul karena Sultan Hamengkubuwono X yang saat ini menjabat sebagai gubernur DIY tidak memiliki anak laki-laki.

Pemberian gelar Mangkubumi kepada putri sulung Sultan menimbulkan konflik dengan para adik Sultan. Dalam sejarah Kraton Yogyakarta, siapapun yang diberikan gelar Mangkubumi merupakan pertanda sebagai pewaris tahta selanjutnya. Untuk membuka peluang perempuan naik tahta, penghapusan frasa “istri” dalam persyaratan calon gubernur dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil putusan ini menimbulkan beragam reaksi baik setuju maupun penolakan. Wacana ini tentu tidak luput dari media massa.

Penelitian ini meneliti bagaimana wacana konflik internal Kraton Yogyakarta tersebut ditampilkan dalam pemberitaan surat kabar harian lokal Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan kecenderungan dari kedua surat kabar harian. Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) lebih menyoroti aspek hukum positif yang mendukung wacana Sultan perempuan. Sedangkan Tribun Jogja lebih menyoroti aspek persyaratan tradisional yang tidak memungkinkan perempuan menjadi Raja. Sehingga, Penolakan adik-adik Sultan menjadi lebih relevan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Keberpihakan Media, Konflik Kraton

I. Pendahuluan

Keraton Yogyakarta merupakan satu dari sekian banyak kerajaan yang masih berdiri kokoh di Indonesia. Bahkan di era demokrasi saat ini, Yogyakarta tetap merupakan daerah swapraja (kesultanan) dengan mempertahankan banyak tatanan feodal lama dan pemerintahan tradisional sejak datangnya penjajah Belanda. Dipimpin oleh seorang Sultan yang berkedudukan sebagai raja sekaligus gubernur.

Sebagai satuan pemerintahan, Daerah Istimewa Yogyakarta diakui sederajat dengan provinsi. Pengakuan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut UU KDIY. Salah satu keistimewaan yang tercantum dalam UU KDIY adalah tata cara pemilihan dan penetapan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Yogyakarta. Berbeda dengan provinsi lain pada umumnya, pemilihan dan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY tidak diselenggarakan melalui pemilihan umum atau Pemilu. Pemilihan dan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY merupakan hak mutlak dan keistimewaan internal Keraton Yogyakarta.

Sesuai dengan UU KDIY pasal 18 ayat (1) huruf c, yang berhak mengisi jabatan gubernur harus bertakhta Sultan Hamengkubuwono sedangkan untuk wakil gubernur bertakhta Adipati Paku Alam. Aturan ini menunjukkan bahwa yang berhak memimpin Yogyakarta dalam arti gubernur sekaligus *raja* adalah mereka yang diakui secara garis turun-temurun keturunan raja Mataram. Sehingga, tidak ada kemungkinan atau

peluang untuk orang awam atau masyarakat biasa diluar Kraton mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta.

Sebagai raja sekaligus gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X selanjutnya disingkat Sultan HB X, memiliki wewenang untuk memutuskan apa pun berkaitan dengan Yogyakarta beserta segala isinya. Setiap keputusan yang diambil oleh Sultan sebagai pemimpin akan berdampak luas. Salah satu keputusan yang menyita perhatian masyarakat bahkan media lokal adalah *sabda raja* pada tahun 2015. Bukan hanya waktu pengumuman *sabda raja* tersebut, tetapi juga isi dari pada *sabda raja* yang diumumkan oleh Sultan tersebut mengagetkan bahkan memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat bahkan menjadi *headline* pada surat kabar harian lokal yang ada di Yogyakarta.

Sabda raja merupakan ucapan atau perkataan seorang raja yang diyakini berasal dari bisikan gaib, wangsit atau *wisik* leluhur. Wisik atau bisikan gaib tersebut bisa diterima raja secara tiba-tiba dan bisa juga setelah seorang raja melakukan tirakat. Hal ini pernah juga dialami oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika harus melakukan kontrak politik dengan pihak Belanda pada tahun 1940. Adapun kebenaran hal tersebut diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam buku biografinya. Beliau sesungguhnya tidak tahu betul, apakah ia telah mendengar suara dari luar dirinya sendiri ataukah ada semacam *self-suggestie*, yaitu perasaan sendiri yang karena tekanan besar lalu muncul dari dalam. Tetapi jika dipikir lebih lanjut, beliau jelas mendengar kata *Tolé* (panggilan orang tua kepada anak lelaki) yang berarti bahwa wisik itu

berasal dari salah seorang nenek moyangnya sendiri (Atmakusumah, 1982:44).

Pada tahun 2015, Sultan Hamengkubuwono X secara tiba-tiba mengeluarkan dua sabda berturut-turut hanya berselang beberapa hari. Sabda raja pertama pada tanggal 30 April 2015, sedangkan sabda raja kedua pada tanggal 5 Mei 2015. Peristiwa tersebut termuat dalam Harian TribunJogja berikut ini.



(Sumber: TribunJogja edisi Rabu, 6 Mei 2015)



(Sumber: TribunJogja edisi Sabtu, 9 Mei 2015)

Adapun isi dari kedua sabda raja tersebut adalah sebagai berikut. Sabda raja yang pertama Sri Sultan HB X mengumumkan pergantian gelar, yakni *Buwono* menjadi *Bawono*, *Kanjeng* menjadi *Sri*, menghilangkan *Khalifatullah* dan *Sayidin* yang kemudian diganti dengan *Langgenging Toto Panotogomo*, dan *Kaping Sedasa* diganti *Kesepuluh*. Sehingga, gelar sultan yang semula *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat* menjadi *Ngarso Dalem Sampeyan Dalem*

Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgenging Toto Panotogomo. Sedangkan, pada sabda raja kedua Sri Sultan HB X memberikan gelar baru kepada putri tertuanya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Pambayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi.

Isi kedua sabda tersebut tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam, melainkan hanya dapat dimengerti oleh keluarga keraton dan pihak-pihak yang memang memahami nilai dan kebudayaan Kraton Yogyakarta. Penghilangan kata “*khalifatullah*” misalnya. Kata tersebut bisa diartikan *Khalifah Allah* dan dalam agama islam, setiap laki-laki islam diberikan tugas untuk syiar islam. Sedangkan dalam biografi Sultan Hamengku Buwono IX menuturkan bahwa, apabila seseorang telah diberi gelar *Mangkubumi*, itu adalah langkah pertama ia dicalonkan untuk menjadi putra mahkota (Atmakusumah, 1982:123). Adanya fakta tambahan bahwa adik-adik Sultan tidak hadir pada saat pengumuman sabda raja tersebut menunjukkan indikasi konflik di internal Keraton Yogyakarta.

Wacana konflik internal Keraton Yogyakarta ini kembali mengemuka setelah salinan resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XIV/2016 keluar pada tanggal 31 Agustus 2017. Keputusan MK ini mengejutkan banyak pihak terutama masyarakat. Disinilah media mengambil perannya sebagai penyedia dan penyebar informasi secara cepat dan luas. Berikut beberapa *headlines* surat kabar harian lokal Yogyakarta yang menampilkan peristiwa terkait putusan MK tersebut.



(Sumber: Harian KR, Merapi, dan TribunJogja edisi Sabtu, 2 September 2017)

Wacana sultan perempuan yang berkembang sejak dikeluarkan sabda raja pada tahun 2015 lalu diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penghapusan frasa “*istri*” pada UUK DIY Nomor 13 Tahun 2012. Dalam UUK DIY pasal 18 ayat (1) huruf m, memuat keharusan seorang calon gubernur dan wakil gubernur DIY wajib menyertakan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, *istri*, dan anak. Kata *istri* ini yang kemudian dijadikan materi gugatan.

Frasa *istri* dalam pasal tersebut diartikan secara tidak langsung berarti selain bergelar Sultan Hamengkubuwono, calon gubernur DIY haruslah seorang laki-laki. Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh mengingat memang sudah sejak dulu Kraton dipimpin oleh seorang Raja. Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai hari ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke X, semuanya adalah seorang laki-laki. Fakta ini juga berkaitan dengan sejarah pengaruh Islam terhadap Kerajaan Mataram yang merupakan asal mula terbentuknya *projo kejawen* atau kerajaan jawa, termasuk Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dimana sistem kewarisan

yang dianut adalah *patrilineal*. Patrilineal berarti menghitung anak keturunan menggunakan garis darah keturunan lelaki atau *trah* laki-laki.

Pengemasan masing-masing media memberikan perbedaan dalam penggunaan bahasa, pemilihan narasumber, pemilihan judul berita, penempatan kalimat, anak kalimat, pemilihan kata, penempatan gambar, posisi berita dan lain sebagainya. Perbedaan ini tidaklah mengherankan karena memang berasal dari sumber media yang berbeda. Sudah tentu wartawan, editor serta lembaga tempat berita ini diolah juga berbeda. Lebih jauh lagi, latar belakang wartawan, visi misi lembaga media, cara kerjanya, dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat pun pasti berbeda.

Wacana konflik internal Kraton Yogyakarta yang ditampilkan oleh media membagi keluarga kraton kedalam dua kubu. Sultan beserta istri dan putri-putrinya berhadapan dengan adik-adik Sultan. Pihak-pihak yang berhadap-hadapan, dibuat seolah-olah mewakili pembaca atau masyarakat Yogyakarta. Realitas yang ditawarkan oleh masing-masing media ini, membuat kita bertanya-tanya apakah benar merupakan cerminan masyarakat saat ini atautkah sebenarnya medialah yang telah berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berseteru.

Berdasarkan paparan diatas, wacana konflik internal Kraton Yogyakarta menarik untuk diteliti lebih lanjut menggunakan analisis wacana kritis. Selain bagaimana makna diproduksi di ruang kerja media hingga sampai kepada masyarakat dalam bentuk tulisan atau berita tercetak. Tetapi lebih lanjut memiliki unsur kekhasan berupa kearifan lokal secara *setting* tempat, penggunaan analisis wacana kritis akan mampu menggali

lebih lanjut makna yang terkandung dalam pemilihan bahasa yang dikemas oleh media dalam bentuk berita.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Paradigma kritis dalam analisis wacana kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Pada polemik suksesi kepemimpinan sultan, penelitian ini akan melihat kekuatan media dalam mendukung penguasa (Sultan) atau memberikan ruang kepada pihak yang disisihkan (adik-adik sultan) melalui bahasa pemberitaan.

Objek dari penelitian ini adalah pemberitaan yang terdapat pada *Harian Kedaulatan Rakyat (KR)* dan *TribunJogja* pada bulan September 2017. Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

Dari metode tersebut, data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Data Primer

Menurut Surakhmad (1990:163), data primer merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Data ini merupakan komponen utama dalam penelitian, karena ketersediaan data primer merupakan faktor utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pemilihan berita terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

2) Data Sekunder

Selain data-data primer, penelitian ini memerlukan data-data sekunder. Data-data sekunder digunakan untuk mendukung atau menunjang data-data primer. Menurut Anwar (2001:35), data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber berupa hasil wawancara kepada wartawan atau editorial media *Harian Kedaulatan Rakyat (KR)* dan *TribunJogja* dan studi literatur yang sesuai dan relevan dengan penelitian berita pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis model Normal Fairclough. Fairclough membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi: teks, *discourse practice*, dan *socioculture practice*. Dalam model Fairclough, teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut (Eriyanto, 2001:286-288).

III. Hasil Penelitian

Masing-masing surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja memosisikan wacana konflik internal Kraton secara berbeda. Kedua media sama-sama menunjukkan adanya konflik internal Kraton terkait Sultan Perempuan sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penghapusan frasa *istri*, akan tetapi dengan kecenderungan yang berbeda. Kecenderungan tersebut antara lain:

1. Pemilihan Judul

Pada pemilihan judul, surat kabar harian Kedaulatan Rakyat lebih mengindikasikan lembaga-lembaga terkait putusan tersebut. Sedangkan surat kabar harian Tribun lebih banyak menunjuk perseorangan secara langsung. Perhatikan gambar berikut;



Baris gambar pertama merupakan judul dari surat kabar harian Tribun Jogja dan baris gambar kedua adalah judul surat kabar harian Kedaulatan Rakyat. Dari pemilihan judul diatas, Tribun Jogja jelas sekali memperlihatkan pihak-pihak yang saling besebrangan. Berbeda dengan Kedaulatan Rakyat yang memilih judul berita senetral mungkin. Tidak memantik provokasi.

2. Pemilihan Narasumber

Seperti halnya pemilihan judul diatas, pemilihan narasumber masing-masing surat kabar harian saling berbanding terbalik. Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, narasumber ahli selalu ditampilkan diawal. Berbeda dengan Tribun Jogja yang memberikan ruang pada pihak-pihak berkonflik.

Setiap pemberitaan Kedaulatan Rakyat akan selalu ada anggota keluarga Sultan untuk berbicara terkait hasil putusan. Berbeda dengan KR. Tribun Jogja selalu menampilkan rayi dalem secara bergantian.

3. Representasi Pihak Berkonflik

a. Sultan

Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, Sultan ditampilkan sebagai sosok yang memiliki memiliki wibawa dan *power* melalui kutipan-kutipan berikut;

“Seharusnya memang begitu, karena negara tidak boleh membeda-bedakan laki-laki atau perempuan (untuk jadi calon gubernur). Konstitusi kan berbunyi siapapun bisa. Ya kita terima keputusan itu”.

“Tidak ada hubungannya dengan paugeran, wong ini soal (pengisian jabatan) gubernur. Lagipula, kalau bicara paugeran, itu yang membuat siapa? Raja! Sudah jelas kan paugeran yang menciptakan siapa”. (Kedaulatan Rakyat, 2 September 2017).

Pada surat kabar harian Tribun Jogja, Sultan ditampilkan sebagai sosok yang keras hati, berikut kutipan dalam pemberitaan;

“Ya kalau keputusan MK begitu ya sudah. Sepakat tidak sepakat”.
(Tribun Jogja, 1 September 2017).

b. Rayi dalem atau adik Sultan

Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, rayi dalem ditampilkan sebagai sosok pembangkang.

“Di negara kita ada istilah hak prerogratif Presiden. Dia bisa bicara dan bersikap apa saja, bisa buat UU, Keppres, Perpu atau apapun itu, tetap saja tidak boleh melanggar Konstitusi! Presiden tidak bisa seenaknya mengubah Konstitusi, begitupula seorang Sultan terhadap paugeran”. (Kedaulatan Rakyat, 2 September 2017).

“Pasal tersebut sudah jelas. Jadi bisa saja asal gubernur DIY tetap sultan yang bernama dan bergelar Ngarso Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono”. (Kedaulatan Rakyat, 5 September 2017).

Pada surat kabar harian Tribun Jogja, rayi dalem ditampilkan sebagai sosok yang berpegang teguh pada budaya.

“Kami akan segera mengadakan pertemuan namun tetap mencoba dengan kepala dingin. Ini bukan masalah tahta tapi ada sesuatu yang tidak sesuai lagi degan paugeran”. (Tribun Jogja, 1 September 2017).

4. Penyebutan nama putri sulung Sultan

Pada pemberitaan yang diterbitkan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) lebih sering menyebutkan gelar GKR Pembayun, sebaliknya pada surat kabar Tribun Jogja lebih sering menggebutkan GKR Mangkubumi.

IV. Penutup

Dalam penelitian ini, peneliti menjawab pertanyaan bagaimana keberpihakan harian Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja dalam wacana konflik internal Kraton Yogyakarta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Bulan September 2017. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik internal Kraton Yogyakarta sudah terjadi sejak Sultan HB X

mengeluarkan sabda dan dawuh Raja pada tahun 2015. Adapun isi sabda dan dawuh Raja mengindikasikan niat Sultan menjadikan putri sulungnya, GKR Pembayun menjadi pewaris tahta. Pemberian gelar baru kepada GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi menjadi peristiwa penting yang diberitakan diberbagai surat kabar harian lokal di Yogyakarta.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 88/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan penghapusan frasa istri pada salah satu syarat calon gubernur DIY dalam UUK DIY pasal 18 ayat (1) huruf m Nomer 13 tahun 2012 membangkitkan kembali wacana konflik internal yang sudah ada dari tahun 2015 menjelang pilkada serempak di Indonesia. Hal ini terkait permasalahan Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki putra laki-laki sebagai penerus tahta. Tentu isu ini memiliki nilai berita yang tinggi bagi warga Yogyakarta yang tidak mungkin dilewatkan oleh media massa.

3. Melalui analisis wacana kritis, dapat diketahui bahwa surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja sama-sama menampilkan wacana konflik internal Kraton meskipun dengan kecenderungan yang berbeda. Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) cenderung ada di pihak penguasa dalam hal ini Sultan dan keluarganya dengan lebih mengulas aspek hukum positif dari hasil putusan MK tersebut. Secara hukum positif jelas hasil putusan MK menguntungkan putri sulung sultan GKR Mangkubumi untuk menjadi pewaris tahta. Sedangkan surat kabar harian Tribun Jogja memiliki kecenderungan ada di pihak rayi dalam dengan pembahasan lebih kepada hukum adat Kraton. Pada setiap

pemberitaan hampir selalu ada perwakilan rayi dalam sebagai narasumbernya.

Pada dasarnya penelitian ini memiliki isu yang sangat menarik dan bisa dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang. Polemik suksesi kepemimpinan Kraton Yogyakarta akan tetap relevan untuk diteliti mengingat Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga menjabat sebagai Gubernur DIY tidak memiliki pewaris laki-laki. Perubahan sosial yang akan sedang atau akan terjadi dimasa depan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap media terhadap perubahan tersebut. Setelah melakukan analisis teks pada wacana konflik internal kraton, selanjutnya peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggali dan menfokuskan lebih pada analisis praktik diskursif media. Dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara detail pada ruang redaksional masing-masing media. Sehingga bisa didapatkan data valid bagaimana kekuatan media massa terhadap pembentukan suatu wacana.

REFERENSI

- Atmakusumah.1982.*Tahtah Untuk Rakyat*.Jakarta: Gramedia.
- Baskoro,Haryadi.2011.*Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya,Merunut Sejarah,Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Davis, Howard dan Walton, Paul.2000.*Bahasa,Citra,Media*.Yogyakarta: Jalasutra.
- Effendi, Onong Uchjana.2000.*Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Eriyanto.2001.*Analisis Wacana*.Yogyakarta: LKiS.
- Endraswara, Suwardi.2013.*Falsafah Kepemimpinan Jawa*.Yogyakarta: Narasi.
- Harari, Yuval (2017). *Sapiens*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Jogersen, Marianne dan Phillips, J.Louise.2010.*Analisis Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansour,Fakih.2006.*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McQuail, Dennis.1991.*Teori Komunikasi Massa*.Jakarta:Erlangga.
- Sobur, Alex.2001.*Analisis Teks Media*.Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Sumardjan, Selo.2009.*Perubahan Sosial di Yogyakarta*.Jakarta: Komunitas Bambu.
- Tamburaka, Apriadi.2013.*Literasi Media*.Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Terj. Julia Cleves Mosses.1996.*Gender dan Pembangunan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Terj. Santrock, J.2003.*Adolesence (Perkembangan Remaja)*.Jakarta: Erlangga.

Jurnal

Annas,Akhirul dan Fitriawan, Rana Akbari.2018.Media dan Kekerasan:Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator.Jurnal Sospol, 4(1), 37-54.

Choiriyati,Wahyuni.2017.Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta dalam Dualitas Struktur.Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(1), 73-84.

Dardias,Bayu.2016.Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektifitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X.Jurnal Masyarakat Indonesia,42(1), 31-49.

Laksono Fajar,Kasim Helmi, Kurniawan Nallom,dkk.2011.Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).Jurnal Konstitusi, 8(6), 1060-1086.

Mukhlisah.2014.Persepsi Tentang Kepemimpinan Perempuan, Scientific dan Religious Reviews.Jurnal Kependidikan Islam, 4(1), 200-228.

Maghvira,Genta.2017.Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tempo.co Tentang Kematian Taruna STIP Jakarta.Jurnal The Messenger, 9(2).

Nuans,Nostal.2015.Korupsi Elit Politik (Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Korupsi Anas Urbaningrum di Harian Seputar Indonesia,SINDO).Jurnal Acta diurnal, 11(1).

Nurchayyo,Dino.2015.Analisis Wacana Pemberitaan Pencalonan Jokowi Sebagai Calon Presiden 2014 Pada Surat Kabar Harian Kompas.Jurnal Wacana, 14(4).

Pahlevi, Akhmad Fathur.2018.Hegemoni Harian Fajar Menjelang Pilpres 2019(Studi Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough).Jurnal Al-Khitabah, 5(2), 142-157.

Pradhani, Sartika Intaning dan Anggara,Alam Sutra.2015.Kedudukan Laki-Laki Dalam Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).Jurnal Penelitian Hukum, 2(3), 148-159.

Prawira, Ida Bagus. 2015. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perseteruan Antara POLRI Dengan KPK Pada Harian Bali Post dan Kompas. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha, 3(1).

Saraswati, Ardhina. 2017. Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Jurnal Mozaik Humaniora, 17(2), 181-191.

Sumarno. 2018. Makna Pisowanan Agung Di Yogyakarta Tahun 1998-2008. Avatara, Volume 6 No 4.

Tutik, T. T. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Perspektif Islam. Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan, Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 6 No 4.

Skripsi

Farid, Muhammad Rifa'at. 2015. Polemik Sultan Perempuan di Yogyakarta (Studi Pasca Kebijakan Penetapan Gusti Pembayun Menjadi Putri Mahkota) [Skripsi]. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Pratiwi, Sinta. Sikap Pers Pasca Tragedi Mapala Unisi (Analisis Isi Harian Jogja, Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Republika) [Skripsi]. Yogyakarta: UII.

Tanjung, Sekar. 2013. Skandal Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul Idham Samawi dalam media cetak (Analisis Framing Pemberitaan Harian Kedaulatan Rakyat dan S.K.H Bernas Jogja Periode Juli-Desember 2013) [Skripsi]. Yogyakarta: UII.

Koran

Kedaulatan Rakyat, Edisi 2 September 2017.

Kedaulatan Rakyat, Edisi 5 September 2017.

Kedaulatan Rakyat, Edisi 9 September 2017.

Tibun Jogja, Edisi 6 Mei 2015.

Tribun Jogja, Edisi 9 Mei 2015.

Tribun Jogja, Edisi 1 September 2017.

Tribun Jogja, Edisi 3 September 2017

Tribun Jogja, Edisi 6 September 2017.